

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan teori *Policy Capacity* dari Wu, Howlett, dan Ramesh (2018), dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan DTSEN secara umum telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas proses pemutakhiran data.

Pada aspek kapasitas analitis, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan proses verifikasi, validasi, dan pemadanan data sesuai dengan pedoman pemerintah pusat melalui pemanfaatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* (SIKS-NG). Pelaksanaan analisis data dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah desa serta didukung oleh data dari instansi terkait. Meskipun demikian, masih ditemukan ketidaksesuaian kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan data yang tersedia akibat perubahan kondisi masyarakat yang berlangsung cepat serta keterlambatan pembaruan data.

Pada aspek kapasitas operasional, pelaksanaan pemutakhiran DTSEN didukung oleh tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, serta prosedur kerja yang telah mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Sosial. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih

menghadapi keterbatasan jumlah petugas, beban kerja yang tinggi, serta kendala jaringan internet yang memengaruhi proses penginputan dan sinkronisasi data.

Selanjutnya, pada aspek kapasitas politik, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah berjalan melalui mekanisme koordinasi dan pertukaran data sesuai kewenangan masing-masing. Dukungan kelembagaan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan DTSEN. Meskipun demikian, koordinasi masih perlu ditingkatkan agar proses pertukaran informasi dan pemutakhiran data dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan telah menunjukkan pelaksanaan yang baik, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas organisasi, khususnya dalam memperkuat kualitas data, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan koordinasi antarlembaga guna mendukung terwujudnya data sosial ekonomi yang lebih akurat, mutakhir, dan terpadu.

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemutakhiran DTSEN di Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi:

1. Adanya regulasi dan petunjuk teknis yang jelas dari pemerintah pusat sebagai pedoman pelaksanaan pemutakhiran data.
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang mempermudah proses verifikasi, validasi, pemadanan, dan pembaruan data secara terintegrasi.
3. Komitmen aparaturnya pelaksana, baik di Dinas Sosial maupun pemerintah desa, dalam melaksanakan proses pemutakhiran data sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
4. Dukungan koordinasi antarinstansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pemerintah desa, serta OPD terkait dalam penyediaan dan pemadanan data.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti komputer, jaringan sistem informasi, dan fasilitas kerja yang menunjang pelaksanaan pemutakhiran data.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemutakhiran DTSEN di Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

1. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung cepat, sehingga data yang tersedia sering kali belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.

2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia, terutama petugas yang menangani proses verifikasi dan validasi data sehingga beban kerja menjadi cukup tinggi.
3. Gangguan jaringan internet dan sistem informasi, yang menyebabkan proses sinkronisasi maupun penginputan data tidak selalu berjalan lancar.
4. Belum optimalnya koordinasi dan pertukaran data antarinstansi sehingga masih ditemukan perbedaan informasi dalam proses pemadanan data.
5. Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme pemutakhiran DTSEN, sehingga terdapat masyarakat yang terlambat melaporkan perubahan kondisi sosial ekonominya.

5.2 Saran

1. Saran Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan menggunakan teori maupun pendekatan yang berbeda sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih luas dalam menganalisis implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan lebih banyak daerah atau membandingkan implementasi DTSEN antarwilayah sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif

sebagai pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya pada bidang implementasi kebijakan dan tata kelola data sosial.

2. Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya Dinas Sosial, diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas pelaksana dalam proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, serta penguatan koordinasi dengan OPD terkait dan pemerintah desa agar proses verifikasi, validasi, dan pemadanan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pemutakhiran data secara berkala, memperkuat mekanisme pertukaran data antarinstansi, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan perubahan kondisi sosial ekonomi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung tersedianya data sosial yang mutakhir, akurat, dan terpadu sehingga mampu meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.